

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pemberitaan media massa di Indonesia meningkat dengan intensitas tinggi seiring dengan terjadinya kebebasan pers yang dimulai sejak munculnya Undang–Undang Keterbukaan Informasi. Menurut Undang–Undang Pers No 40 tahun 1999, Pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media massa cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.(Wardhani,2008:21). Hal itu menunjukkan terbukanya pengelolaan media massa dengan bebas.

Pers yang dahulu berpihak hanya kepada pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan kini menjadi terbuka bagi siapa pun yang ingin mengembangkan dunia pers. Hingga saat ini karena luasnya pengaruh yang diakibatkan oleh pers menjadikan pers sebagai pilar ke empat yang dapat mempengaruhi pemerintah. Pengaruh yang timbul dari media massa atau pers ini adalah kecenderungan opini masyarakat secara umum, terhadap pemerintahan

yang sedang berlangsung disuatu negara. Pemerintah melalui pemberitaan pers ini dapat dinilai baik dalam menjalankan pemerintahannya atau justru sebaliknya, pemerintahan yang ada cenderung buruk dan tidak berpihak kepada rakyat sesuai dengan konstruksi pemberitaan oleh media massa. Opini secara umum inilah yang dapat dibangun oleh media massa atau pers sehingga pengaruhnya sangat kuat dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan.

Pers terbagi ke dalam beberapa jenis media, seperti pers media cetak dan pers media elektronik. Sebagai pusat informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat, melalui pembingkaiian isi pemberitaan yang disajikan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Media massa secara umum memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, bahkan mempengaruhi sikap, baik peorangan, organisasi, kelompok bahkan masyarakat.(Wardhani,2008:25). Pengaruh ini yang dapat menjadi titik perubahan sikap dan perilaku melalui *framing* pemberitaan yang ditampilkan, yang dimuat dalam media massa yang akhirnya digunakan untuk memasukkan ideologi, pemikiran, faham, dan kepentingan yang diinginkan oleh pemilik media massa.

Media massa menurut Dedi, melakukan proses pesan melalui sistem yang sistematis dan tersusun rapi. Tidak semua pesan dapat dengan bebas diterima oleh khalayak, namun harus melalui proses seleksi oleh media. Semua pesan yang diproduksi akan masuk ke dalam wilayah pemilihan redaksi. Pemilihan pesan berlandaskan pada dua kepentingan besar, penting menurut media dan penting menurut khalayak. Jika salah satu unsur kepentingan tersebut tidak terpenuhi,

maka pesan tidak akan disampaikan. (Kurnia,2012:11). Hal ini menjadi dasar pemingkaiian (*framing*) pemberitaan oleh media massa, dalam menyebarkan informasi tentang suatu peristiwa kepada khalayak, sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari pemberitaan media massa.

Didalam media massa cetak, atau surat kabar terdapat beberapa pembagian informasi berdasarkan jenisnya yang disebut rubrik. Onong memberikan pengertian mengenai rubrik ini sebagai acara tertentu untuk kelompok pembaca, pendengar atau penonton tertentu (Effendy,2005:32). Rubrik ini sebagai kumpulan informasi sejenis yang berasal dari beberapa peristiwa, dan dijadikan satu tempat guna memudahkan dalam proses pencarian. Salah satu rubrik tersebut adalah rubrik politik pada kedua surat kabar harian tersebut. Rubrik politik sebagai wadah informasi politik baik daerah, lokal maupun nasional yang menjadi sumber pengetahuan dan informasi politik bagi masyarakat. Pada surat kabar harian Lampung Post terdapat satu halaman rubrik politik pada halaman 2, dan pada surat kabar harian Radar Lampung pada halaman 12. Kedua rubrik tersebut menyajikan informasi politik di daerah, nasional, bahkan internasional, tidak terkecuali pemberitaan politik mengenai adanya DPR Tandingan yang terjadi di Badan Legislatif Negara Republik Indonesia.

Di Indonesia, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2014 terjadi peristiwa terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tandingan. Kronologi terbentuknya DPR Tandingan ini diawali dengan Sidang Pengesahan UU MD-3 Tentang Alat dan Kelengkapan Dewan. DPR Tandingan dibentuk oleh

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atas mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPR RI yang dikuasai oleh Politikus Koalisi Merah Putih (KMP). (*sumber:jpnn.com*). Disebut DPR Tandingan karena DPR ini terbentuk atas rasa tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang sah karena dianggap akan menjegal pemerintahan presiden Jokowi-JK.

DPR Tandingan menjadi bahan pemberitaan menarik, dimana banyak pihak menyatakan setuju dengan berbagai alasan terbentuknya DPR Tandingan, namun disisi lain juga banyak yang tidak setuju dimana DPR yang sah menurut Undang-Undang adalah DPR Republik Indonesia yang diketuai oleh Setya Novanto yang telah dilantik secara resmi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 Oktober 2014. Peristiwa ini muncul menimbulkan banyak pendapat diberbagai pihak, misalnya pada fraksi DPR yang pro terhadap terbentuknya DPR Tandingan menganggap ketua DPR yang sah akan menjegal pemerintahan presiden Jokowi-JK. Kemudian di pihak yang kontra dengan DPR Tandingan beranggapan bahwa, terbentuknya DPR Tandingan karena kekecewaan dari fraksi KIH yang tidak mendapatkan jatah pimpinan komisi dewan.

Kedua pendapat berbeda tersebut kemudian berlanjut terus dan masing-masing pihak yang konflik saling mencari-cari alasan untuk saling membenarkan, baik pihak DPR yang sah, maupun pihak DPR Tandingan. Oleh karena itu semakin banyak juga ahli di pemerintahan mengeluarkan pendapat mereka tentang peristiwa ini, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap kecenderungan pemberitaan pada media massa.

DPR Tandingan terbentuk tanggal 29 Oktober 2014 sebagai ketua yang ditunjuk adalah Pramono Anung yang merupakan politisi PDI-P, dan 4 wakil ketua DPR Tandingan yakni Abdul Kadir Karding (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), Syaifullah Tamliha (PPP), dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura), yang menandingi pimpinan DPR yang sah yang telah dilantik oleh MA tanggal 2 Oktober 2014 yakni ketua DPR Setya Novanto (Golkar), dan wakilnya Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).

Peristiwa tersebut menjadi pemberitaan hangat di media massa, tidak terkecuali pada surat kabar harian Lampung Post yang merupakan anak dari Media Indonesia milik Politikus Partai Nasdem Surya Paloh, dan pemberitaan pada surat kabar harian Radar Lampung yang merupakan anak dari *The Jawa Post Group* milik Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang merupakan calon presiden konvensional dari partai Demokrat. Kecenderungan pemberitaan pada kedua media massa ini akan berpengaruh terhadap sudut pandang masyarakat dalam menyikapi pro dan kontra terbentuknya DPR Tandingan.

Surya Paloh sebagai pemilik perusahaan Media Indonesia *group* merupakan politisi partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan anggota dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Surat kabar harian Lampung Post merupakan anak dari perusahaan Media Indonesia milik Surya Paloh. *Jawa Post National Network* (JPNN) merupakan media yang dimiliki oleh Dahlan Iskan, dan surat kabar harian Radar Lampung merupakan anak dari JPNN milik Dahlan Iskan yang merupakan politisi

dari partai Demokrat yang berpihak pada Koalisi Merah Putih (KMP). Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *framing* (pembingkaihan) berita DPR Tandingan pada surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung. Untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media massa melalui *framing* berita kedua media massa tersebut.

## **1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah *framing* berita DPR Tandingan yang ditulis pada surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung periode 29 Oktober sampai 10 November 2014.

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menjelaskan *framing* berita DPR Tandingan dengan metode analisis *framing* model Robert N Entman pada pemberitaan DPR Tandingan surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung periode 29 Oktober – 10 November 2014.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

1. Secara teoritis

Menambah referensi ilmiah dalam penelitian sehingga memberikan rujukan baru dalam penelitian komunikasi dengan metode analisis *Framing* model Robert N Entman.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan mahasiswa, dan hasilnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.
- b. Memberikan masukan kepada pembaca untuk lebih kritis dalam membaca berita di media massa termasuk surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung.